

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2013, Presiden Tiongkok, Xi Jinping mulai membicarakan visinya mengenai program *One Belt One Road* (OBOR) untuk meningkatkan konektivitas antara Asia, Afrika, dan Eropa, baik melalui jalur darat maupun melalui jalur laut. Xi Jinping pertama kali membicarakannya dengan negara lain saat melakukan kunjungan pada bulan September 2013 di Kazakhstan dan Oktober 2013 di Indonesia. Program ini juga disebut sebagai *Belt and Road Initiative* (BRI) (Xinhua, 2015). Konektivitas Asia, Afrika, dan Eropa pada BRI ini wujud utamanya adalah pembangunan infrastruktur untuk memperlancar hubungan dagang antara Asia, Afrika, dan Eropa. BRI ini mencakup banyak proyek infrastruktur di banyak negara dan disebut-sebut menguntungkan untuk semua pihak, baik untuk Tiongkok maupun untuk negara yang bekerjasama dengan Tiongkok dalam proyek ini. Proyek ini mendapatkan respon positif dari beberapa negara yang memang membutuhkan dana untuk melakukan pembangunan infrastruktur negara tersebut (Kuo & Kommenda, 2018).

Di antara proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi bagian dari OBOR, salah satu proyek yang terbesar adalah *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC). CPEC merupakan serangkaian proyek pembangunan infrastruktur raksasa di Pakistan yang meliputi pembangunan jalan, penghasil energi, fasilitas penyimpanan, pelabuhan, transportasi, dan berbagai elemen lain yang menjadi satu dibawah nama CPEC (Chohan, 2017). CPEC diresmikan pada tanggal 20 April 2015 bersamaan dengan kunjungan Xi Jinping ke Pakistan dan menandatangani perjanjian investasi senilai US\$ 46 Milyar dengan prioritas pembangunan di sektor transportasi dan sektor energi (Stevens, 2015). CPEC meliputi jalur sepanjang 3.218 kilometer berupa jalan raya, jalan untuk kereta api, maupun saluran pipa-pipa yang akan menghubungkan Kota Gwadar yang terletak di Provinsi Balochistan, Pakistan ke Kota Kashgar di Provinsi Xinjiang, Tiongkok. Gwadar sendiri menjadi titik penting secara geografis karena terletak di antara Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Barat di tepian Teluk Persia (Times of India, 2016).

Pembangunan sektor energi akan menjadi prioritas mengingat Pakistan merupakan negara yang memiliki kekurangan energi yang cukup besar. Kekurangan dalam sektor energi Pakistan mencapai 4000 Megawatt dan bisa naik menjadi 7000 Megawatt atau sekitar 32 persen dari total kebutuhan listrik. Kekurangan energi ini telah menyebabkan kerugian sebesar 14 Milyar Rupee Pakistan yaitu sekitar 7% PDB Pakistan pada 2017. Keadaan ini menyebabkan

sektor industri Pakistan menyusut. Pabrik-pabrik terpaksa menggunakan generator diesel untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sekitar 500.000 keluarga terdampak menjadi pengangguran karena pabrik-pabrik terpaksa tutup karena kekurangan energi (Javid, 2018).

Meski begitu proyek CPEC tetaplah sebuah proyek yang beresiko besar. Pakistan memang membangun CPEC dengan bantuan investasi dari Tiongkok namun investasi itu didapatkan Pakistan melalui hutang kepada Tiongkok. Besar hutang Pakistan membuat banyak pihak khawatir. Jumlah hutang yang ditanggung Pakistan dianggap berbahaya. Keadaan ekonomi Pakistan juga membuat banyak pihak khawatir Pakistan akan terjebak dalam *debt trap* atau jebakan hutang seperti menurut Alice Wells, Sekretaris Amerika Serikat untuk Asia Selatan (Mahar, 2020). Menurut Bank Sentral Pakistan per 2015 rasio hutang luar negeri Pakistan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) menyentuh angka sekitar 63,3 persen hutang luar negeri Pakistan. Kehadiran proyek ini meningkatkan rasio ini. Rasio hutang luar negeri Pakistan terhadap PDB pada tahun 2018 naik menjadi 72,1 persen (Trading Economics, 2020). Apabila Pakistan tidak mampu membayar hutangnya, bukan tidak mungkin Pakistan akan jatuh ke dalam *debt trap*.

Sebagian warga Pakistan yang tinggal di kota Gwadar, tempat yang sentral bagi CPEC juga mengkhawatirkan kedatangan warga Tiongkok dan warga Pakistan dari provinsi lain sebagai pekerja dan menjadikan warga asli Gwadar minoritas di kota mereka sendiri. Selain itu beberapa warga mengatakan bahwa di Gwadar para nelayan yang jumlahnya ribuan tidak diperbolehkan melaut dan disuruh menjauh dari daerah pelabuhan yang akan dibangun. Seorang warga lokal kota Gwadar, Dr. Abdul Aziz berkata: *“Our resources are being plundered, and we are being deprived of our livelihood. Many people had to move to remote areas after the government started the construction of Gwadar Port,”* Aziz juga menambahkan bahwa orang-orang dari luar daerah sudah berdatangan dan mulai membeli beberapa lahan di kota Gwadar (Khan, 2016).

Proyek CPEC juga memiliki ancaman keamanan dengan keberadaan grup separatis Balochistan Liberation Army (BLA). BLA sudah beberapa kali melancarkan aksi teror di provinsi tersebut. Mereka melakukan serangan tersebut untuk mencoba meruntuhkan Kerjasama Tiongkok dan Pakistan karena mereka memandang Proyek CPEC yang memakan biaya milyaran US\$ sebagai garis hidup pemerintah Pakistan (Aamir, 2018).

Semenjak diumumkannya kerjasama Pakistan-Tiongkok dalam CPEC, telah muncul beberapa penelitian yang mengangkat CPEC sebagai temanya. Namun sejauh ini belum ada penelitian yang sejenis dengan penelitian ini. Daniel Samosir pada tahun 2017 dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Tiongkok membentuk CPEC

menjelaskan faktor utama Tiongkok membentuk CPEC adalah ketahanan energi dan meningkatkan dominasi ekonomi Tiongkok di dunia dan menciptakan ketergantungan ekonomi kepada Tiongkok di kawasan Asia Selatan (Samosir, 2017).

Dalam penelitian Algivan Rizki di tahun 2019 dijelaskan mengenai strategi diplomasi Tiongkok dalam menghadapi penolakan India pada proyek CPEC yang merupakan proyek *flagship* dari OBOR. Strategi diplomasi Tiongkok untuk menghalau penolakan India adalah dengan membentuk *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* dan memasukkan India. India sendiri menjadi negara dengan pengajuan proyek terbanyak dan Tiongkok juga tidak melakukan veto walaupun memiliki hak terhadap proyek-proyek yang diajukan India dan sebagai gantinya India tidak memprotes saat pendanaan proyek-proyek OBOR diajukan di AIIB. Selain itu Tiongkok juga merangkul India dalam pembangunan *Bangladesh-China-India-Mongolia Economic Corridors* atau BCIM-EC dan Tiongkok juga melakukan pendekatan melalui media-media surat kabar yang digabung dalam *Belt and Road News Network (BRRN)* dimana merupakan kumpulan surat kabar dari negara-negara yang tergabung oleh BRI yang memberitakan mengenai perkembangan OBOR sebagai bentuk bahwa proyek ini memiliki transparansi terhadap warga dan dunia (Rizki, 2019).

Penelitian dari Septyanto Galan Prakoso, A.P. Murtyantoro, Meisya P.I. Cahyani di tahun 2019 menjelaskan bahwa kerjasama antara Tiongkok dan Pakistan dalam CPEC tidak mungkin terjadi tanpa adanya *common interests* diantara keduanya. Tiongkok dan Pakistan memiliki musuh yang sama yaitu India. Pakistan berselisih karena perbedaan pandangan ideologi dan politik dengan India, sedangkan Tiongkok karena ada konflik kepentingan dengan India seperti perselisihan militer di Doklam dan karena India berusaha memboikot jalannya BRI atau OBOR. Mereka juga menjelaskan walau kedaulatan Pakistan terancam karena keberadaan Angkatan Laut Tiongkok di Gwadar akan tetapi keamanan nasional Pakistan di kawasan juga terjamin karena keberadaan Angkatan Laut Tiongkok memberi perlindungan dari ancaman India di Kawasan karena India dan Pakistan merupakan musuh dan seringkali berseteru secara aktif (Prakoso, et al., 2019)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah objek penelitiannya. Penelitian lain dalam menganalisa CPEC cenderung menggunakan Tiongkok sebagai objek penelitian, namun penulis mendesignasikan Pakistan sebagai objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor di balik bersedianya Pakistan bekerjasama bilateral dengan Tiongkok dalam proyek CPEC sebagai bentuk yang dilakukan Pakistan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari Tiongkok. Penelitian ini dapat menambah sudut pandang lain dalam mengenai paradigma Liberalisme dan politik luar negeri Pakistan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Mengapa Pakistan bersedia melaksanakan kerjasama bilateral dengan Tiongkok dalam proyek CPEC periode 2015-2020 walaupun proyek ini memiliki banyak kontroversi?”.

1.3. Kerangka Teori

Rumusan masalah penelitian ini merujuk pada pencarian jawaban mengenai mengapa sebuah negara bersedia untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Untuk menjelaskan topik tersebut, peneliti akan menggunakan paradigma liberalisme.

Pemilihan teori ini dikarenakan dalam konteks kasus keputusan Pakistan untuk tetap melakukan kerjasama bilateral dengan Tiongkok, Liberalisme dinilai merupakan alat yang cocok untuk dipergunakan dalam analisis. Liberalisme yang menekankan transaksi ekonomi untuk menghindari perang/konflik dan justru mempererat hubungan, di samping itu juga keberadaan konsep *absolute gains*, akan mampu menjelaskan mengapa Pakistan tetap bersedia memulai CPEC padahal di saat yang sama proyek ini dinilai membahayakan oleh negara-negara lain tanpa terkecuali India.

1.3.1. Paradigma Liberalisme

Liberalisme bisa disebut sebagai salah satu pemikiran yang paling awal di dalam perdebatan teoretik ilmu Hubungan Internasional. Liberalisme sendiri merupakan tradisi intelektual yang bila dilacak, ia berasal dari Eropa. Lahir karena semangat Abad Pencerahan yang dimotori salah satunya oleh John Locke, Immanuel Kant, dan Adam Smith, Liberalisme berkembang menjadi ideologi politik yang berpengaruh di Eropa pada zaman itu, bahkan berhasil menyebar ke seluruh dunia (Rosyidin, 2020, p. 43). Di dalam ranah ilmu Hubungan Internasional, Liberalisme berkembang pesat setelah Perang Dunia I saat Presiden Woodrow Wilson memformulasikan 14 butir prinsip perdamaian yang bertujuan demi menyelesaikan perang. Gagasan Woodrow Wilson ini selanjutnya mengilhami dan termaktub dalam pendirian Liga Bangsa Bangsa.

Pada keberjalanannya Liberalisme memiliki beberapa asumsi dasar. Walaupun di dalam tubuh Liberalisme sendiri ada perbedaan pendapat, namun para teoretikus paradigma ini tetap memiliki kesamaan di beberapa poin di antaranya di dalam melihat aktor, hakikat tujuan, dan hakikat struktur internasional.

1.3.1.1. Aktor

Berbeda dengan Realisme yang menekankan peran sentral negara dalam hubungan internasional, Liberalisme justru berpendapat bahwa aktor hubungan internasional bukanlah negara, namun melainkan kelompok dan individu (Jackson & Sorensen, 2013). Negara dengan begitu bukanlah entitas tunggal (*unitary*) sebagaimana argument Realisme, tetapi adalah representasi kumpulan individu-individu yang tergabung dalam sebuah institusi sosial. Dengan begitu, dalam Liberalisme, individu dan kelompok-kelompok sosial memegang peranan penting dalam merumuskan kebijakan suatu negara. Negara dengan alur logika ini berarti hanyalah sebuah entitas yang dijanjikan oleh sekelompok individu di dalamnya. Masih dalam trajektori yang sama, Liberalisme mengadopsi pendekatan bottom-up dan inside looking out karena mempercayai bahwa politik internasional hanyalah kelanjutan dari konstelasi politik domestik. Pemikiran ini pada gilirannya menjadikan faktor domestik sebuah negara sebagai konsiderasi utama apabila ingin menganalisis sebuah hubungan antarnegara.

1.3.1.2. Tujuan Negara

Sehubungan dengan pandangan bahwa negara hanyalah sebuah entitas yang dikendalikan oleh individu dan kelompok yang ada di dalamnya, maka menurut Liberalisme, kepentingan nasional haruslah bertumpu pada keinginan aktor-aktor domestik yang telah disebutkan sebelumnya. Kepentingan negara secara *an sich* yang bersifat *unitary* tidaklah eksis, yang ada adalah kepentingan aktor-aktor domestik sebuah negara. Dalam kosakata lain, Moravcsik (1997) menyebut negara hanyalah sebagai *transmission belt* atau penyambung aspirasi-aspirasi domestik ke politik internasional (Moravcsik, 1997). Walaupun aktor dalam hubungan internasional bermacam-macam seperti *Non-Governmental Organization* (NGO), *International Non-Government Organization* (INGO), Organisasi Internasional dll, negara dinilai Lembaga yang paling efektif dan efisien untuk memperjuangkan kepentingan individu dan kelompok. Lebih jauh lagi, bentuk-bentuk kepentingan nasional bisa berupa-rupa bentuk, berbeda seperti Realisme yang selalu berbicara tentang *power*. Akan tetapi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kepentingan ini tetap tergantung oleh *driving factor* yang dihasilkan oleh konstelasi politik aktor domestik.

1.3.1.3. Struktur Internasional

Berbeda jauh dengan Realisme yang memandang bahwa struktur internasional sebagai arena konflik yang brutal dan penuh perebutan kekuasaan, Liberalisme memandang struktur internasional bersifat kolaboratif: negara-negara yang ada di

dalamnya akan mengedepankan kerjasama yang sehat daripada konflik yang merugikan. Pandangan ini lahir dari semangat liberalisme klasik Abad Pencerahan yang mempercayai bahwa manusia dianugerahi rasio. Rasio yang dimiliki manusia ini berfungsi untuk membedakan mana hal yang baik atau sebaliknya. Rasio ini yang membimbing manusia untuk melihat konflik sebagai hal yang negatif, dan membedakan dengan Realisme yang memandang konflik sebagai hal yang wajar dan netral. Daripada bergabung ke dalam berperang dan merugikan, Liberalisme menganjurkan kerjasama yang menguntungkan, seperti misalnya perdagangan. Dengan kerjasama, setiap negara dapat memenuhi tujuan mereka masing-masing, bahkan mampu menciptakan kemakmuran sebagaimana ditekankan Liberalisme ala Adam Smith.

Pandangan ini selanjutnya dikritik oleh Neorealisme yang mengatakan bahwa kerjasama akan sulit dilakukan karena kondisi natural kerjasama antarnegara akan bersifat *zero-sum game*, atau menang-kalah, yang nantinya mewujudkan keuntungan relatif (*relative gains*). Kritikan ini dijawab lagi oleh kaum neoliberalis bahwa pada dasarnya kerjasama bersifat *non-zero-sum game* karena masing-masing negara dapat memaksimalkan keuntungan mereka dan mencapai keuntungan absolut (*absolute gains*) (Jackson & Sorensen, 2013). Sederhananya, keuntungan relatif menanyakan “siapa yang akan mendapatkan keuntungan lebih banyak?” sedangkan keuntungan absolut menanyakan “apa yang paling menguntungkan bagi saya?” (Burchill, 2005, p. 122). Lebih lanjut, menurut Neoliberalisme, banyak negara yang merasa cukup aman dengan memaksimalkan keuntungan dirinya sendiri tanpa melihat keuntungan milik pihak lain. Keuntungan bersama yang muncul dengan adanya kerjasama merupakan suatu hal yang mungkin terjadi karena negara-negara tidak selalu terpaku pada keuntungan relatif (Burchill, et al., 2005, p. 65).

Dalam penelitian ini, penulis akan mengaplikasikan paradigma Liberalisme dalam menjelaskan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagaimana yang ditekankan oleh Liberalisme bahwa negara akan cenderung bekerjasama alih-alih konflik, Pakistan memilih untuk bekerjasama dengan Tiongkok daripada harus terjebak dalam rivalitas yang merugikan. OBOR yang dinilai membahayakan oleh negara-negara lain nampaknya tidak berlaku bagi Pakistan karena adanya dorongan kepentingan domestik untuk pembangunan ekonomi dalam negeri. Alih-alih akan ditentang dengan keras, eksistensi OBOR justru bertemu dengan kepentingan Pakistan tentang peningkatan ekonomi, dan nantinya terlembagakan dalam CPEC.

1.4.Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini yang ditarik berdasarkan latar belakang dan kerangka teori yang telah dijelaskan adalah alasan Pakistan bersedia untuk melakukan kerjasama dengan Tiongkok dalam proyek CPEC, walaupun dipenuhi dengan keraguan dari berbagai pihak, adalah karena adanya kepentingan ekonomi.

1.5. Metodologi Penelitian

Penelitian yang akan digunakan yaitu, studi pustaka dengan teknik pengumpulan data berdasarkan metodologi kualitatif. Sumber pustaka dapat diambil dari buku, jurnal, maupun media lainnya seperti internet dengan tetap mengutamakan kredibilitas sumber untuk menunjang penulisan penelitian ini. Penelitian ini bersifat eksplanatif yang dijelaskan dengan metode analisis *process tracing*. Metode ini digunakan karena dapat menjelaskan mengenai sebab akibat dari suatu fenomena yang terjadi. Jangkauan penelitian dibatasi pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Pemilihan jangkauan penelitian oleh penulis dikarenakan 2015 merupakan permulaan proyek CPEC secara resmi dan perkembangannya hingga saat ini.

